



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 07 Juni 2016

Halaman: 4

Rp 4,2 M untuk Ubah Kawasan Kumuh Yogya

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menarget, wilayahnya akan bebas dari kawasan kumuh di tahun 2019 mendatang. Berdasar Surat Keputusan (SK) Wali Kota Yogyakarta nomor 393/2011, luasan kawasan kumuh mencapai 8,6 persen dari total wilayah.

Adapun angka 8,6 persen tersebut seluas 278 hektare yang tersebar di 13 kecamatan, 35 kelurahan, dan 206 rukun warga. Sebagian besar wilayah kumuh berada di bantaran sungai, menengok di tempat itu belum memiliki sarana sanitasi yang memadai.

Di tahun 2016, Pemkot Yogyakarta mengucurkan anggaran sebesar Rp 4,2

miliar untuk membangun infrastruktur di kawasan kumuh perkotaan. Di tahun ini, Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo dipilih menjadi tempat yang dikucuri dana oleh Pemkot.

"Tahap pertama membuat saluran air untuk menghindari banjir atau genangan yang membuat kumuh sudah jalan. Tahap pertama ditarget selesai sebelum Idul Fitri," kata Lurah Sorosutan, Kresno Irianto, Senin (6/6).

Diungkapkannya, meski pembangunan tiap tahap dilakukan oleh pihak ketiga, namun sejak awal pembangunan, masyarakat aktif melakukan pengawasan, baik saat perencanaan maupun saat pengerjaan. Sehingga pengerjaan sesu-

ai dengan harapan masyarakat.

"Tapi kami juga tekan, pengawasan dari masyarakat harus objektif. Tidak atas dasar subjektif," lanjut dia.

Pengawasan masyarakat

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh Sorosutan, Endro mengatakan, masukan saran dan pengawasan dari masyarakat adalah hal yang penting dilakukan. Meski sebenarnya pihaknya telah menerjunkan tim pengawasan sendiri.

"Pembangunan infrastruktur untuk menekan kawasan kumuh sudah dilakukan sejak tahun lalu," sambung Endro. (mrf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Sorosutan			

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005